




PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SIFANIHA

Sarlince Sandy Mauk¹
Regolinda Manen²

¹ Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia
* Email Korespondensi: sarlinc sandy@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima tgl. 09/12/2024 Diperbaiki tgl. 09/12/2024 Disetujui tgl. 09/12/2024 Tersedia daring tgl. 09/12/2024	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (KAD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD), di Desa Sifaniha. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa dan Sebagian masyarakat di Desa Sifaniha. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji <i>Outer Model</i> , <i>Inner Model</i> , dan Uji Interaksi <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) dengan alat analisis <i>Smart PLS</i> 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat memoderasi hubungan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312	
DOI: 10.58290/jmbo.v3i2.367	
 ©2024. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)	

PENDAHULUAN

Desa dikatakan jadi ujung tombak pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh aparatur desa. Sejak ditetapkannya Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

(Huda, 2022).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan (Nisak et al., 2023). Desa juga merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengungkapkan, total alokasi anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp 68 Triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 343 kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. Kebijakan ini berdampak pada proses pengelolannya, yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk menghindari terjadinya penyimpangan (www.liputan6.com).

Pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas keuangan desa (Kutu & Sanda, 2022). Siklus pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Polutu et al., 2022).

Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) (Nurlinda, 2018).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan (Puspa & Prasetyo, 2020). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Kharisma & Widajantie, 2021).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi et al., 2018).

Akuntabilitas juga dapat menunjukkan bahwa aparatur desa telah bekerja dengan benar, etis dan bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Salah satu tugas aparatur desa yaitu mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kompetensi yang dimiliki aparatur desa menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah dalam menjalankan tugasnya. (Pahlawan et al., 2020).

Apabila aparatur kandas dalam menguasai perihal tersebut maka, dapat mengakibatkan kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, serta kesalahan laporan dariwarga sehingga bisa mempengaruhi keputusan yang diambil kedepannya (Taufik dan Anggraini, 2018). Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa seperti laporan keuangan yang tidak akuntabel karena aparatur desa yang tidak kompeten dalam pengelolaan Dana Desa (Pahlawan et al., 2020)

Faktor lain yang menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal Keuangan desa sangat dibutuhkan dalam mengatur

dana desa yang telah dipercayakan pemerintah pusat kepada pemerintah desa mengingat dana desa yang dikucurkan memiliki jumlah yang sangat fantastis (Rahmaidah, 2022). Aparatur desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan (Pahlawan et al., 2020).

Selain kompetensi Aparatur Desa dan sistem pengendalian internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntabilitas pemerintahan desa memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi dapat diidentifikasi sebagai salah satu komponen dari sistem keuangan desa yang dapat meningkatkan akuntabilitas (Rahmawati et al., 2023).

Secara universal kasus dari penerapan pengelolaan dana desa di bermacam desa terletak pada belum maksimalnya fitur desa dalam melakukan pertanggungjawaban (Huda, 2022). Salah satu contohnya adalah Desa Sifaniha. Desa Sifaniha merupakan desa yang tidak merata dalam pembagian Dana BLT dan pembagian hewan ternak seperti kambing dan babi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan adanya korupsi di desa tersebut (kampungkb.bkkbn.go.id).

BPD Desa Sifaniha menemukan bahwa masalah ini terjadi karena mantan pejabat kepala desa Sifaniha dan pejabat kepala desa Sifaniha memanipulasi dokumen APBDesa tahun 2022 dengan merubah sejumlah item kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen asli (NusraInside & Dirga, 2023). Menurut BPD Desa Sifaniha bahwa penyelewengan dana desa ini sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dari BPD mengambil tindakan untuk melaporkan penyelewengan dana desa oleh mantan pejabat kepala desa dan pejabat kepala desa Sifaniha ke Kejaksaan Negeri TTU (Ciompah, 2024).

Tindak korupsi, seperti Dana BLT, hewan ternak, yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada pihak desa terjadi karena ketidakpahaman aparatur desa dan kecurangan yang dilakukan oleh mantan pejabat kepala desa dan pejabat kepala desa serta aparatur lainnya dalam memanipulasi data yang ada sehingga menyebabkan adanya tindak korupsi (News, 2023).

Permasalahan diatas memicu terjadinya laporan keuangan yang tidak akuntabel, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman perangkat desa tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel diharapkan mampu mengubah kondisi pemerintahan menjadi demokratis dan lebih baik.

Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dan system pengendalian internal yang baik oleh aparatur desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya (Sukmawati & Fitri, 2019).

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten atau Kota. Adapun Pengalokasian Dana Desa menurut (Peraturan Bupati No 2, 2019) dilihat berdasarkan:

1. Jumlah penduduk desa (10%)
2. Angka kemiskinan desa (50%)
3. Luas wilayah desa (15%)
4. Tingkat kesulitan geografis desa (25%)

Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai dengan

ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) (Nurlinda, 2018).

Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Menurut (Widiawaty, 2019) Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Sistem Pengendalian Internal (X2)

Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi oprasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan (Deftrianto at al., 2018).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi. Teknologi informasi juga digunakan sebagai teknologi komunikasi yaitu untuk penyebaran sebuah informasi. Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya yang mungkin manusia tidak mampu untuk melakukannya (Aulia, 2018).

Hubungan Teoritis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

1. Terdapat Pengaruh Hubungan Antara Kompetensi Aparatur Desa (X1) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Sutrepti et al., 2022).

Semakin banyak aparatur desa yang berkompeten dibidangnya akan semakin memberikan kemudahan dalam penggunaan dana desa, dengan memiliki kemampuan yang baik, mampu meminimalisir taraf kesalahan pada saat membuat perencanaan, penyelenggaraan, ataupun sampai mempertanggungjawabkan atas dana itu sendiri (Tarjo, 2019).

Hasil penelitian (Rr Titiek, 2020) membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devi et al., 2021) yang menemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena keterlibatan sumber daya manusia, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Kompetensi Aparatur Desa (X1) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

2. Terdapat Pengaruh Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal (X2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa sangat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Jika pengendalian internal suatu pemerintah lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan kecil (Kurnia et al., 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Atiningsih & Ningtyas, 2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Didukung dengan penelitian (Yesinia et al., 2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik pula Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Sistem Pengendalian Internal (X2) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

3. Terdapat Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, selain itu teknologi informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Haza, 2015).

Perkembangan teknologi informasi di era yang serba modern saat ini serta tuntutan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan desa yang semakin tinggi, aparatur desa selaku agen tentunya memerlukan sebuah alat atau sistem yang dapat membantu dalam rangkaian pekerjaan aparatur desa. BPKP menciptakan sebuah sistem berupa aplikasi yang diyakini dapat membantu pengelolaan dana desa

yaitu aplikasi Siskeudes (Kurnia et al., 2023).

Perangkat desa yang memanfaatkan teknologi informasi dengan baik maka akan mempengaruhi maksimalnya program-program pemerintah yang akan dijalankan dan akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban yang diberikan kepada publik sehingga lebih mengedepankan kepentingan publik (Rezkiyanti, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan Teknologi

Informasi (Z) memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4. Terdapat Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kebutuhan yang sangat penting. Melalui kemajuan teknologi, aplikasi yang ada selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman (Rasuli at al., 2022). Pengendalian internal merupakan alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap program-program yang telah dijalankan oleh

pemerintah desa secara lebih cepat dan efisien (Abbaszadeh et al., 2019). Oleh sebab itu semakin tinggi pemahaman perangkat desa terhadap sistem pengendalian internal dan didorong semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadil, 2020) menemukan bahwa teknologi informasi memperkuat sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa (Y).

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (Sugyono, 2019).

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan metode survey, dimana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur desa dan sebagian masyarakat di kantor Desa Se-Kecamatan Biboki Anleu yaitu sebanyak 9 Desa. Populasi pada penelitian ini tidak diketahui secara pasti karena tidak ada data yang akurat tentang berapa jumlah Aparatur Desa yang bekerja di kantor desa Se-kecamatan Biboki Anleu.

Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Probability Sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Berhubung dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti maka ukuran sampel ditentukan dari jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel penelitian dikalikan dengan kriteria 5-10. Dalam penelitian ini jumlah indikator dari variabel Y, X1, X2 dan Z berjumlah 16 indikator maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak $6 \times 16 = 96$ orang responden (Ferdinand, 2012). Untuk memenuhi kriteria dari data-data yang akan diolah maka peneliti menambah jumlah responden dari 96 orang menjadi 100 orang responden

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kuesioner (angket).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik analisis

data menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berbasis komponen varian. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data tidak harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar (Sugiyono, 2019).

PLS adalah teknik statistika multivariant dengan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang dapat menyelesaikan perbandingan antara variabel independen berganda dan dependen berganda ada data seperti ukuran sampel, adanya data yang hilang dan multikolinearitas PLS dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. PLS juga disebut sebagai soft modelling karena PLS dapat merelaksasi asumsi regresi PLS yang ketat dan tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen (Hamid & Anwar, 2019).

Analisa Outer Model

Analisa *outer model* digunakan untuk menguji apakah pengukuran yang digunakan telah layak untuk dijadikan pengukuran yang valid dan *reliabel*.

a. Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk melihat Korelasi antar skor indikator reflektif dengan skor variabel latennya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh *outer loading*

dimensi variabel memiliki nilai *loading* > 0,5 (Abdullah, 2015).

b. Discriminant Validity

Menurut (Ghozali dan Latan, 2015), metode *discriminant validity* adalah dengan menguji *validitas discriminant* dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus > 0,7.

c. Compositere Reliability (CR)

Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *composite reliability* ≥ 0.7 (Abdullah, 2015).

d. Cronbach's Alpha

Uji *Compositere reliability* dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *Cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's alpha* > 0,70 (Abdulah, 2015).

Analisa Inner Model

a. R-Square

Hasil dari *R-square* dapat merepresentasikan jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai *R-square* yang dihasilkan maka semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan (Gozali & Latan, 2015).

b. Goodness of Fit (F Square)

Uji kebaikan kebaikan model atau model fit menggunakan SRMR dan Gof dimana SRMR singktan dari *Standardized Root Mean Square Residual*. Nilai SRMR dibawah 0,08 menunjukkan model fit (cocok) nilai SRMR antara 0,08 - 0,10 menunjukkan model *acceptable fit* (Hair et., al, 2021).

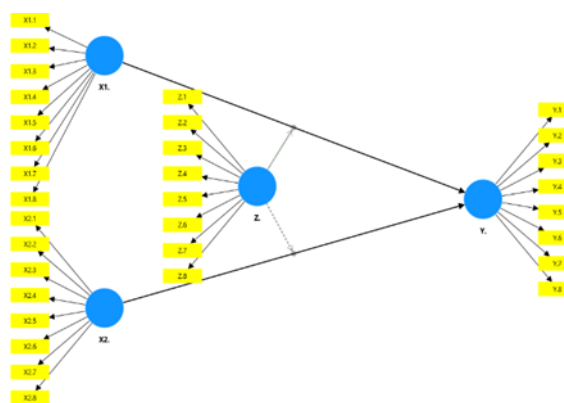
c. Uji Hipotesis (Bootsraping)

Bootstrapping digunakan untuk menilai/menguji signifikansi pengaruh antar variabel. Dalam metode ini, nilai signifikansi yang digunakan (*two-tailed*) *t-value* 1,65 (*significance level*=10%), 1,96 (*significance level*=5% dan 2,58 (*significance level*=1%) (Gozali & Latan, 2015).

Analisis Regresi Moderasi

Pengujian interaksi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisa Outer Model



Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Gambar 1 Hasil Output Outer Loading

Konstruk kompetensi aparatur desa (X₁) diukur dengan 8 buah indikator. Konstruk Sistem pengendalian internal (X₂) diukur dengan 8 buah indikator. Konstruk pemanfaatan teknologi informasi (Z) diukur dengan 8 buah indikator. Konstruk akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) diukur dengan 8 buah indikator. Hubungan yang akan

diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antar konstruk.

a. *Convergent Validity*

Indikator dianggap valid apabila nilai koefisien > 0,70. Outer loadings pada penelitian ini semua variabel indikatornya sudah memiliki nilai > 0,70. Hal ini berarti indikator dapat dianggap valid (Abdullah, 2015).

Tabel 1 Hasil *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Outer Loadings	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	X1.1	0.940	Valid
	X1.2	0.940	Valid
	X1.3	0.935	Valid
	X1.4	0.883	Valid
	X1.5	0.891	Valid
	X1.6	0.932	Valid
	X1.7	0.915	Valid
	X1.8	0.943	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	X2.1	0.899	Valid
	X2.2	0.907	Valid
	X2.3	0.902	Valid
	X2.4	0.917	Valid
	X2.5	0.819	Valid
	X2.6	0.787	Valid
	X2.7	0.800	Valid
	X2.8	0.770	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0.945	Valid
	Y.2	0.955	Valid
	Y.3	0.942	Valid
	Y.4	0.937	Valid
	Y.5	0.971	Valid
	Y.6	0.949	Valid
	Y.7	0.972	Valid
	Y.8	0.970	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	Z.1	0.839	Valid
	Z.2	0.868	Valid
	Z.3	0.881	Valid
	Z.4	0.861	Valid
	Z.5	0.873	Valid
	Z.6	0.800	Valid
	Z.7	0.780	Valid
	Z.8	0.791	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa *loading factor* memberikan nilai diatas yang disarankan yaitu sebesar > 0,70 untuk dimensi X₁, X₂, Z dan Y. Artinya dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi *convergent validity*.

b. *Discriminant Validity*

Tabel 2 *Discriminant Validity*

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.851	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.726	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.912	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	0.701	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui bahwa nilai AVE dari variabel kompetensi aparatur desa < 0,5 dengan nilai sebesar 0,851, untuk nilai variabel sistem pengendalian internal > 0,5 dengan nilai sebesar 0.726, untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa > 0,5 dengan nilai sebesar 0.912, serta pada variabel pemanfaatan teknologi informasi > 0,5 dengan nilai sebesar 0.701. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

c. Composite Reliability

Tabel 3 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability (Rho-A)	Composite Reliability (Rho-C)	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.982	0.979	Reliable
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.948	0.955	Reliable
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.987	0.988	Reliable
Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	0.982	0.949	Reliable

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *Composite reliability* (*rho-c*) dari variabel kompetensi aparatur desa > 0,7 dengan nilai sebesar 0.979, untuk variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai > dari 0,7 yaitu 0.955, untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai > 0,7 yaitu 0.988, serta variabel pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki nilai yang lebih besar dari 0,7 yaitu sebesar 0.949. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara konsisten mampu menjawab pertanyaan, dan tingkat reliabilitas yang baik untuk semua konstruk.

d. Cronbach's Alpha

Tabel 4 Cronbach's Alpha

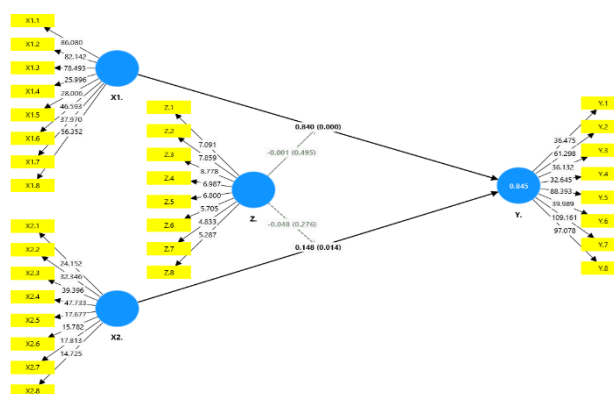
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0.975	Reliable
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0.945	Reliable
Akuntabilitas Pengelolaan	0.986	Reliable

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Dana Desa (Y)		
Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	0.943	Reliable

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat diketahui bahwa *Cronbach's Alpha* dari variabel kompetensi aparatur desa > 0,7 dengan nilai sebesar 0.975, untuk variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai > dari 0,7 yaitu 0.945, untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai > 0,7 yaitu 0.986, serta variabel pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki nilai yang lebih besar dari 0,7 yaitu sebesar 0.943. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara konsisten mampu menjawab pertanyaan, dan tingkat reliabilitas yang baik untuk semua konstruk.

Hasil Analisa Inner Model



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

Gambar 2 Hasil Uji Inner Model

Setelah model yang di estimasi telah memenuhi kriteria *outer model* maka selanjutnya dilakukan pengujian *inner model* atau hipotesis.

a. R-Square

Hasil *Adjusted R-Square* mewakili total dari variabel yang dijelaskan oleh model disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,853	0,845

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa model *Adjusted R-Square* dari variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki kriteria kuat dengan nilai sebesar 0,845. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hubungan yang kuat dengan variabel lain, persentase sebesar 84,5%.

b. Goodness of Fit (F Square)

Nilai *Goodness of Fit (F Square)* dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6 SRMR Model Fit

	Taksiran Model
SRMR	0,079

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada program *Smart PLS* diperoleh nilai SRMR sebesar 0,079 atau 79%. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat diajukan oleh model penelitian sebesar 79%, sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh faktor lain yang berada diluar penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian

ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

c. Uji Hipotesis (Boothstraping)

Hasil uji hipotesis menggunakan program *Smart PLS* dapat dilihat melalui *Path Coefficient* teknik *Boothstraping* sebagai berikut:

Tabel 7 Path Coefficients

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (ST DEV)	T Statistics (O/ST DEV)	P Value	Keterangan
KA D -> AP DD	0.840	0.819	0.067	12.497	0.000	Positif dan Signifikan
SPI -> AP DD	0.148	0.170	0.067	2.210	0.014	Positif dan Signifikan
PTI* KA D -> AP DD	0.001	0.027	0.074	0.013	0.495	Negatif dan tidak Signifikan
PTI* SPI -> AP DD	0.048	0.018	0.080	0.596	0.276	Negatif dan tidak Signifikan

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Pengujian Langsung

Pengujian hipotesis menggunakan Teknik analisis *Boothstraping* melalui hasil t-statistik yang diperoleh, pengaruh tingkat signifikan antara variabel eksogen ke variabel endogen. Apabila nilai t-statistik > 1,96 (t-tabel signifikansi 5%) maka pengaruhnya adalah signifikan. Selanjutnya melalui hasil dari nilai P Value yang diperoleh apabila nilai P

Value pada setiap variabel $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Pengaruh positif dapat dilihat melalui Original Sample. Hasil ringkasan pengujian pengaruh langsung sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Pengaruh Langsung

	Hipotesis	Arah	Besar Pengaruh	T Statistics	T-Tab el	P Value	Keterangan
KAD->APDD	H1	+	0.840	12.497	1,96	0.000	Positif dan signifikan
SPI->APDD	H2	+	0.148	2.210	1,96	0.014	Positif dan signifikan

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa t-statistik dari pengaruh langsung variabel kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih besar dari t-tabel (1,96) yaitu sebesar 12,497 dengan besar pengaruh 0,840 dan nilai P-value $< 0,05$ sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H1 Diterima.

Nilai t-statistik dari variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih besar dari t-tabel (1,96) yaitu sebesar 2,210 dengan besar pengaruh 0,148 dan nilai P-value $< 0,05$ sebesar 0,014, Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H2 diterima.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Hasil analisis dapat dilihat dari *indirects effects* teknik *bootstrapping*. Hasil

ringkasan sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

	Hipotesis	Besar Pengaruh	T Statistics	T-Tab el	P Value	Keterangan
PTI* KAD->APDD	H3	0.001	0.013	1,96	0.495	Negatif dan Tidak Signifikan
PTI* SPI->APDD	H4	0.048	0.596	1,96	0.276	Negatif dan Tidak Signifikan

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

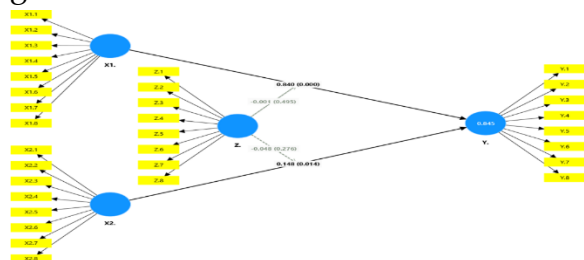
Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai t-statistik, pengaruh variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh pemanfaatan teknologi informasi, lebih kecil dari nilai statistik t-tabel (1,96) yaitu sebesar 0,013 dengan besar pengaruh 0,001 dan p-value $> 0,05$ sebesar 0,495, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H3 ditolak, karena pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa maka, variabel tersebut merupakan variabel bebas/prediktor atau variabel moderasi berperan sebagai variabel bebas dalam model

Nilai t-statistik variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi

oleh pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari nilai statistik t-tabel (1,96) yaitu sebesar 0,596 dengan besar pengaruh 0,048 dan p-value > 0,05 sebesar 0,276, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H4 ditolak, karena pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa maka, variabel tersebut merupakan variabel bebas/prediktor atau variabel moderasi berperan sebagai variabel bebas dalam model.

Moderated Regression Analysis (MRA)

MRA bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel eksogen dan endogen yang dalam hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah (variabel moderasi). Jika nilai *P Values* < 0,05 maka dikatakan signifikan sebaliknya jika nilai *P Values* > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan atau variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara variabel eksogen terhadap endogen (Ghozali, 2018). Hasil uji MRA dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Berdasarkan gambar 3 hasil uji MRA menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena nilai *P Value* yang dihasilkan 0,495 > 0,05 yang berarti tidak terdapat interaksi antara variabel eksogen terhadap endogen. Demikian juga variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena nilai *P Value* 0,276 > 0,05.

Pembahasan

1. Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kompetensi aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga ikut meningkat.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Atiningsih & Ningtyas, 2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara langsung, penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sapartiningsih, et al., 2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pengawasan yang dilakukan maka akan semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atiningsih & Ningtyas, 2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara langsung. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Walyati, 2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil analisis MRA menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi hubungan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi, 2019) pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustofa et al., 2022) yang menunjukkan hasil bahwa Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil analisis MRA menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karyadi, 2019) pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustofa et al., 2022) yang menunjukkan hasil bahwa Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 1st edn. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Atiningsih, S., Aulia, Ningtyas, C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1),79-97.
- Aulia. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota (Studi Empiris Pada Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX). *Economics and Busines*, 1(1), 1-15.
- Ghozali, & Latan. (2015). Analisis Perilaku Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan Fraud Di Kabupaten Pasaman . *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(4), 1588-1598.
- Hair, J.F. et al. (2021) *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLSSEM) Using R, Practical Assessment, Research and Evaluation*. New York: Sage Publication.
- Hamid, & Anwar. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian*. Jakarta Pusat: PT Inkubator.
- Huda, F. M. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan SPI Dengan TI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di desa kecamatan Brondong kabupaten Lamongan). *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 5(3), 238-249. <https://doi.org/10.32493/skt.v5i3.16397>
- Kutu, & Sanda. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting, Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 1(1), 224-248.
- Nisak, Karyadi, & Parama. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Seminar Nasional Sosiologi*, 4(2), 175-188.
- Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 63-72.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat

- Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Polutu, A., Mattoasi, & Usman. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review Journal*, 3(2), 66-78.
- Puspa, & Prasetyo. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533-1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta, CV.
- Supadmi, N. L., Dharma Suputra, D. G. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 132-145.
- Sutrepti, Sumadi, & Muliati. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Petang. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 25-35.
- Tarjo. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Faktor Internal Dan Eksternal. *Conference on Economic and Business Innovation*, 24(2), 175-192.
- Taufik dan Lila Anggraini, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Bintan). *JOM FEB*, 1(1), 1-13. <http://batam.tribunnews.com>
- Widiawaty. (2019). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 116-126.